

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Akadun, Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, 2011, p.183. MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 183-191
- Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm, Al-Maktabah al-Hayat, Beirut. 1925
- Amal, Ichlasul dan Nasikun, 1988, Desentralisasi dan Prospeknya, P3PK, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Bartle, Phil. Training Modules Community Development', dalam Webside <http://www.scn.org/mpfc/modules/int-inin.htm>, yang dikelola The Community Development Society (CDS) oleh the Seattle Community Network (SCN) dari <http://www.scn.org/mpfc/modules/int-inin.htm>;
- Bryant, C. dan L. G White (1989). Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Jakarta: LP3ES. Hal. 306
- Bryson, John M. 2002. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial (Penerjemah M. Miftahuddin), Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelalajar;
- Budi Winarno. 2002. Apakah Kebijakan Publik ? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Chombers, Robert. 2001. Participatory Rural Appraisal (PRA), Memahami Desa SecaraPartisipatif, (Penerjemah Sukoco, Y.), Cet. VIII, Yogyakarta, Yayasan Mitra Tani;
- Collier, William L. 1996. Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun (Penerjemah Sajogya), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia;
- Conyers, Diana, 1984, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Cetakanke-1 tahun 1991, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Conyers, Diana. 1991. Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Program Pembangunan bagi Perempuan II (Penerjemah. Adriana, Lisa Hadiz, Sita Aripurnami Cs.), kerja sama Kalyana Mitra, CIDA dan ESCAP, Jakarta;
- Djazuli, A. Persoalan dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturi, IAIN SGD, Bandung, 1990.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dzunuwanus Ghulam Manar. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ; Kajian atas Pelaksanaan Musrenbang di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Sosial Vol 13. Februari 2014, Hal 41-42
- Edstrom, Judith dan Yoenarsih Nazar. 2006. Seri Teknologi Pelatihan: Menyiapkan Kegiatan Pelatihan Partisipatif (Referensi Fasilitator) Local Governance Support Program & Local Government Management Systems. Program LGSP didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan International City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009;
- Fernandes, Walter dan Rajesh Tandon (Ed.). 1993. Riset Partisipatoris Riset Pembebasan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama kerja sama Yayasan Karti Sarana.
- Good Governance Brie/Vol. 1 Juny 2007, Musrenbang as Key Driver in Effective Participatorf Budgets: Key Issues and PerspectivesforImprovements, USAID and LGSP (Local Government Support Program).
- Hadist Bukhori- Muslim. Buku pustaka Islam

Harian Jateng POS, Kamis, 22 Maret 2018

Huda, Ni'matul, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Iskandar, J. (2001). Teori dan Isu Pembangunan, Garut: Uniga. Hal. 131

Jedawi, Mortir, 2001, Desentralisasi dan Implementasi di Indonesia, Makalah, Makassar, PPs Unhas.

Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

Lembaran Sambutan Bupati - Rancangan KUPA PPAS (Perubahan) 2018

M. Ali Bazar Marilau, S. Sos. Tanjung Pinang Pos. Manfaat Perda Bagi Masyarakat. 22 Mei 2018

Munir. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi. NTB, Bappeda, 2002.

Panduan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Seri Pelatihan Fasilitator Musrenbang Tahunan Daerah. 1970. Jakarta, USAID-LGST (Local Government Support Program);

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Purwanto, Dyah.2012. *Implementasi Kebijakan Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gava Media

Riyadi, Dady.S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Roger M. Schwarz, *The Skilled Facilitator*, 1994: 9.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sema Ardianto. Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018 : 193- 202.

Siagian, S.P, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 4

Soedjito Tjk. (2002). Reaktualisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, (elib.pdii.lipi.go.id/ katalog/ index .php/ searchkatalog/ 11_01679.pdf)

Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h 42-43

Sunarno, Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika

Suyata, Antonius, 2000, Reformasi dalam Penegakan Hukum, Jakarta, Djambatan.

Syafie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Eresco.

Wahab, S. A. (2004). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 3.

Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Perkembangan Hukum Modern dan Rasional: Sosiologi Hukum Max Weber dalam Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

William, Jim. 2002. Community Dovelopment (Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice), Capter 10 dalam Principle of Community Development, Australia, Langman Australia Pty Ltd.

Wrihatmolo, R. R. (2009). Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep dan Mekanisme, Jakarta: LPEM FE UI. Hal. 7.

Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, Al-Ikhlash Surabaya, 1963;

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perubahan-Perubahannya, 2007, Visimedia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

C. LAIN-LAIN

<http://www.baperlitbang.kendalkab.go.id/>

<http://www.kendalkab.go.id/>

<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>

http://www.jdih.kendalkab.go.id/produk_hukum/daerah/